

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT seiring dengan selesainya Pelaporan Kinerja Tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur.

Pelaporan Kinerja Tahun 2016 merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja SKPD kepada masyarakat sekaligus sebagai informasi sekunder bagi penentu kebijakan. Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja dari pelaksanaan seluruh kegiatan di Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan di tahun 2016.

Pelaporan Kinerja Tahun 2016 disusun sesuai kaidah yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam perencanaan program/kegiatan di tahun mendatang dan memberi arti lebih kepada pengembangan kemandirian pangan di Kalimantan Timur.

Salam Kaltim Maju 2018

Samarinda, 30 Desember 2016
Kepala,

Ir. Fuad Asaddin, M.Si
NIP. 19600715 198908 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii.....
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I	PENDAHULUAN.....
	1
	A. Dasar Pembentukan Organisasi.....
	1
	B. Aspek Strategis Organisasi.....
	1
	C. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....
	1
	D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....
	1
	E. Struktur Organisasi.....
	1
	F. Sumber Daya Manusia.....
	2
	3
	4
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....
	6
	A. Rencana Strategis.....
	6
	B. Rencana Kinerja Tahunan 2016.....
	9
	C. Perjanjian Kinerja.....
	17
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....
	18
	A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....
	18
	B. Analisis Capaian Kinerja.....
	18
	C. Realisasi Anggaran.....
	20
BAB IV	PENUTUP.....
	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	4.....
Tabel 1.6.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	5
Tabel 1.6.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	5
Tabel 2.1.1	Indikator kinerja utama dan target BKPP	7..
Tabel 2.2.1	Rencana Kerja Tahunan (RKT) SKPD	12
Tabel 2.3.1	Perjanjian Kinerja	17
Tabel 3.1.1	Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016	18
Tabel 3.2.1	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis	18
Tabel 3.2.2	Realisasi Kinerja 2015 dan 2016	18
Tabel 3.2.3	Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s.d 2016	19
Tabel 3.2.4	Efisiensi Tingkat Capaian Sasaran Strategis	20
Tabel 3.3.1	Realisasi Anggaran 2016	21

DAFTAR GAMBAR

iv

Gambar 1.	Struktur Organisasi BKPP.....	3.....
Gambar 2.	Struktur Organisasi UPTB Balai Pelatihan Pertanian.....	4

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi.

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tanggal 23 Juli 2008 Lampiran VI dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

B. Aspek Strategis Organisasi

Aspek strategis organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan PERDA Nomor 09 Tahun 2008 yaitu:

- (1) Pengkajian, penyiapan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- (2) Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan distribusi pangan;
- (3) Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan;
- (4) Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan penyuluhan;
- (5) Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pelatihan petani dan nelayan;

C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila btidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi adalah untuk mengidentifikasi hasil inventarisasi permasalahan yang dikelompokkan pada

permasalahan pokok. Guna identifikasi permasalahan ini adalah sebagai acuan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat terkait dengan efektifitas peran lembaga dalam mendukung suksesnya tujuan Ketahanan Pangan, dan Penyuluhan di Kalimantan Timur.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur Bagian Keenam Paragraf 1 pasal 118 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah melaksanakan penyusunan Kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

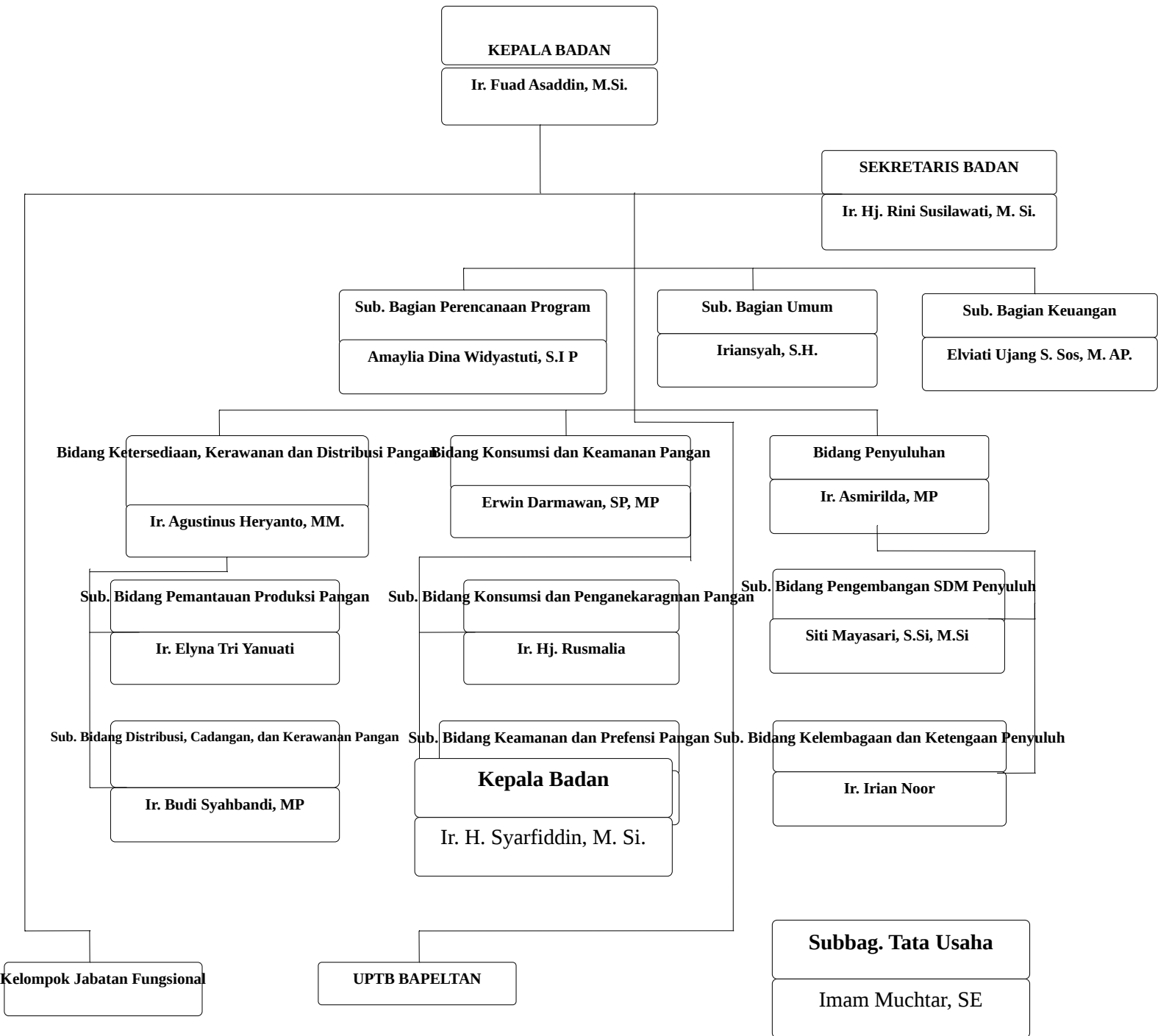
Sedangkan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur terdapat pada pasal 119 sampai dengan pasal 137, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang ketersediaan kerawanan dan distribusi pangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang penyuluhan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

E. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur

sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2008, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi BKPP

Seksi Pengembangan Teknologi

Firdaus J, SP., M. Si.

Seksi Penyelenggara Pelatihan

Ir. Nursidah, M. Si.

Gambar 2. Struktur Organisasi UPTB Balai Pelatihan Pertanian

E. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi pegawai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Unit	Pendidikan						Jumlah
	S3	S2	S1	Diploma	SMA	SMP/SD	
Badan	-	10	27	2	6	2	47
UPTB	-	4	13	1	8	2	28
Jumlah	-	14	40	3	14	4	75
Sumber : Subbag Umum 2016							

Tabel 1.6.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

Golongan	Gender		Jumlah	Prosentase (%)
	P	W		
IV	9	3	12	16,00

Golongan	Gender		Jumlah	Prosentase (%)
	P	W		
III	25	30	55	73,33
II	4	2	6	8,00
I	2	-	2	2,67
Jumlah	40	35	75	
Persentase	53,33	46,67		100,00

Sumber : Subbag Umum 2016

Tabel 1.6.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

Unit	Struktur dan Fungsional			
	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional
Badan	1	3	9	7
UPTB	-	1	3	7
Jumlah	1	4	11	14

Sumber : Subbag Umum 2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sejalan dengan Visi Gubernur Kalimantan Timur dengan motto **”Tuntaskan Membangun Kaltim untuk Semua”** yaitu **”Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”**, maka Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merumuskan visi sebagai berikut :

”Menjadi Lembaga Tangguh dan Aspiratif Dalam Mendukung Terwujudnya Ketahanan Pangan dan Peran Penyuluh yang Mantap”

Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna yaitu Lembaga : formulasi kebijakan yang mendukung perencanaan, pembinaan dan pengendalian pangan; Tangguh : tegar, jujur dan mandiri yang bertanggungjawab; Aspiratif : membuka diri dalam melaksanakan program dan kegiatan ketahanan pangan : meningkatkan ketersediaan, distribusi dan penanggulangan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan serta pemanfaatan pangan; Mantap berarti berkelanjutan; Peran Penyuluh berarti berilmu, terampil dan berkarakter.

2. Misi

Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan dijabarkan berdasarkan Misi Gubernur Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD 2013 – 2018 Provinsi Kalimantan Timur, yaitu : **”Terwujudnya Pertumbuhan dan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Timur”**. Dalam rangka untuk menggapai visi organisasi, maka Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

- a. Mewujudkan ketersediaan pangan pokok.
- b. Mewujudkan konsumsi pangan rumah tangga beragam, bergizi, seimbang, aman dan sehat.
- c. Mewujudkan penyuluhan yang profesional.

3. Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Kegiatan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada. Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan;
- b. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- c. Meningkatnya distribusi dan aksesibilitas pangan masyarakat;
- d. Meningkatkan produktivitas penyuluh;

4. Sasaran

Sasaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013-2018 adalah :

- a. Peningkatan ketersediaan energi dan protein;
- b. Ketersediaan pangan pemerintah;
- c. Peningkatan konsumsi energi dan protein;
- d. Penurunan konsumsi beras perkapita pertahun;
- e. Stabilitas harga pangan;
- f. Stabilitas pasokan pangan;
- g. Ketersediaan informasi harga pangan pokok;
- h. Tersedianya penyuluh satu desa satu penyuluh;
- i. Kelembagaan penyuluh yang berfungsi.

5. Indikator Kinerja

Masing - masing tujuan tersebut merupakan indikator kinerja utama Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur, berikut target yang ingin dicapai:

Tabel 2.1.1 Indikator kinerja utama dan target BKPP

Indikator Kinerja	Target
Persentase ketersediaan energi dan protein	95 %
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82 Poin

6. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal dan harus mengenal kondisi – kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya *controllable* (dapat dikuasai) dan sifatnya *uncontrollable* (relatif kurang dikuasai), mengetahui faktor peluang ancaman menggunakan pendekatan analisis, *Strength* (Kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (Ancaman). Strategi Badan Ketahanan Pangan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Ketahanan Pangan periode 2013 – 2018 berdasarkan subsistem ketahanan pangan, sebagai berikut:

- a. Tingkat persentase ketersediaan pangan;
- b. Tingkat skor PPH diversifikasi;
- c. Tingkat persentase penurunan konsumsi beras;
- d. Tingkat persentase keamanan pangan;
- e. Tingkat jumlah ketersediaan penyuluh.

7. Kebijakan

Arah dan kebijakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (RPJMD) tahun 2013 -2018. Sedangkan kebijakan teknis ketahanan pangan dan penyuluhan yang berada dalam kewenangan dan perlu penanganan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kalimantan Timur adalah :

- a. Dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan, maka perlu diarahkan pada meningkatnya ketersediaan sebagai pangan utama dan cadangan pemerintah, melalui pencapaian jumlah ketersediaan pangan daerah sebesar 100%.
- b. Dalam upaya meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, maka perlu diarahkan pada meningkatnya persentase penurunan konsumsi beras sebesar 1.50 %/kap/tahun; meningkatnya skor PPH diversifikasi pangan sebesar 95 poin; meningkatnya persentase keamanan pangan sebesar 90%.
- c. Dalam upaya meningkatkan produktivitas penyuluh, maka perlu diarahkan pada meningkatnya jumlah ketersediaan penyuluh sebanyak 1.211 orang dan 140 BPP.

8. Program

Program pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur terbagi dalam 2 kategori program yaitu:

1) Program Strategis

Program strategis merupakan program yang menjadi inti urusan ketahanan pangan dan penyuluhan yang wajib dan prioritas dilaksanakan, antara lain :

- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- b. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian;
- c. Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan;
- d. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan penyuluh.

2) Program Pendukung

Program pendukung merupakan program dan kegiatan yang bersifat operasional dan manajerial yang mendukung pencapaian program strategis. Program tersebut antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- f. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kinerja Tahun 2016 didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan. Adapun tujuan RKT SKPD Tahun 2016 adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki/dikuasainya secara berkelanjutan;
2. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi kerawanan pangan;
3. Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;
4. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan konsumsi beras per kapita;
5. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar;

6. Meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani dalam rangka peningkatan produktivitas petani, usaha tani dan pendapatan petani;
7. Meningkatkan peran kelembagaan petani untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian petani;
8. Peningkatan kompetensi kerja aparatur dan kompetensi non aparatur pertanian, perikanan dan kehutanan;
9. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan;
10. Meningkatkan pelayanan dan tata kelola administrasi, dukungan manajemen teknis lainnya pada SKPD.

Sedangkan sasaran strategis Tahun 2016 adalah :

1. Ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 kilo kalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;
2. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 0.5% setiap tahun;
3. Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal 2.000 kilo kalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;
4. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbia-umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2015 sebesar 91,50.
5. Terpantainya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat di tiga sentra produksi;
6. Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi dan cadangan pangan pemerintah di 10 Kabupaten/Kota, serta terbangun dan berkembangnya lumbung pangan sebanyak 17 unit sampai dengan tahun 2018;
7. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
8. Fasilitasi 846 Orang penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan kelautan;
9. Penyediaan sistem informasi dan materi penyuluhan untuk 5 sub sektor;
10. Fasilitasi penumbuhan 500 Gapoktan dengan program pemberdayaan petani;
11. Penataan dan klasifikasi kelembagaan P4S;
12. Standarisasi, pemetaan spesialis dan peningkatan profesionalisme 3 Orang Widyaiswara pada UPTB;
13. Meningkatnya peran kelembagaan 39 BPP penyuluhan pertanian, kehutanan dan perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan;
14. Meningkatkan kualitas SDM penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan;

15. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan dan pengendalian dalam kebijakan ketahanan pangan dan penyuluhan;
16. Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dalam mendukung program pemerintah daerah.

TABEL 2.2.1 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)**

**SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
TAHUN : 2016**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Program/Kegiatan		Anggaran	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
						Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
1.	Peningkatan ketersediaan energi dan protein	1.	Jumlah ketersediaan kalori	2.800	kkal/kap/hr	1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Rp.	204.645.000
		2.	Jumlah ketersediaan protein	75	gram/kap/hr	2.	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	Rp.	142.800.000
						3.	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	Rp.	287.700.000
						4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp.	1.220.800.000
						Jumlah		Rp.	1.855.945.000
2.	Ketersediaan pangan pemerintah	3.	Jumlah cadangan pangan pemerintah setara beras	175	Ton	5.	Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	Rp.	125.450.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Program/Kegiatan		Anggaran	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
						6.	Pengembangan Cadangan Pangan	Rp.	1.384.275.000
						7.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Rp.	134.850.000
						8.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	Rp.	1.673.710.000
						Jumlah		Rp.	3.318.285.000
3.	Peningkatan konsumsi energi dan protein	4.	Jumlah konsumsi kalori minimal	1.920	kkal/kap/hr	9.	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	Rp.	85.500.000
		5.	Jumlah konsumsi protein minimal	54.4	gram/kap/hr	10.	Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan	Rp.	485.100.000
						11.	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Rp.	2.387.925.000
						Jumlah		Rp.	2.958.525.000
4.	Penurunan konsumsi beras per kapita per tahun	6.	Jumlah konsumsi beras	79.64	kg/kap/thn	12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	Rp.	180.800.000
						13.	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	Rp.	995.450.000
						14.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	Rp.	297.250.000
						Jumlah		Rp.	1.473.500.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Program/Kegiatan		Anggaran	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
5.	Stabilitas harga pangan	7.	% Stabilitas harga pangan	10	%	15.	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	Rp.	160.300.000
						Jumlah		Rp.	160.300.000
6.	Stabilitas pasokan pangan	8.	% Stabilitas pasokan pangan	85	%	16.	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Rp.	83.850.000
						Jumlah		Rp.	83.850.000
7.	Ketersediaan informasi harga pangan pokok	9	% Ketersediaan informasi harga pangan pokok	85	%	17.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Rp.	212.020.000
						Jumlah		Rp.	212.020.000
						Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan			
8.	Tersedianya penyuluh satu desa satu penyuluh	10.	Jumlah penyuluh pertanian berkualitas	985	Orang	18.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Rp.	3.654.638.000

						19.	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	Rp.	171.500.000
--	--	--	--	--	--	-----	---	-----	-------------

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Program/Kegiatan		Anggaran	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
						20.	Pengembangan SDM Penyuluh	Rp.	495.250.000
						21.	Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan	Rp.	936.825.000
						22.	Koordinasi Kebijakan Penyuluh	Rp.	243.375.000
						23.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh	Rp.	124.000.000
						Jumlah		Rp.	5.625.588.000
		11.	Jumlah penyuluh perikanan berkualitas	100	Orang		Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas		
						24.	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Kelautan dan Perikanan	Rp.	353.550.000
						Jumlah			353.550.000

							Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh		
9.	Kelembagaan penyuluh yang berfungsi	12.	Jumlah BPP	120	Unit	25.	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh	Rp.	948.750.000
							Jumlah	Rp.	948.750.000

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target		Program/Kegiatan		Anggaran	
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
							Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		
						26.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Rp.	1.698.200.000
						27.	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Rp.	4.361.000.000
						28.	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Rp.	376.025.000
							Jumlah	Rp.	6.435.225.000

								23.425.538.000
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

C. Perjanjian Kinerja

Tabel 2.3.1 Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	2	3		4
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan energi dan protein	95	Persen
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82	Poin

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Tabel .3.1.1 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2016

NO	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
	3	4			
1.	Persentase ketersediaan energi dan protein/PPH Ketersediaan	Poin	95	97,26	102
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	82	82,6	101

B. Analisis Capaian Kinerja

Sasaran 1 Meningkatnya ketersediaan pangan

Tabel 3.2.1 Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase ketersediaan energi dan protein/PPH Ketersediaan	Poin	95	97,26	102
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	82	82,6	101

Tabel 3.2.2 Realisasi Kinerja 2015 dan 2016

No	Indikator	Satuan	2015	2016	Kinerja Naik/Turun
1.	Persentase ketersediaan energi dan protein/PPH Ketersediaan	Poin	97,74	97,26	-0,48
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	79,9	82,6	2,7

Peningkatan /Penurunan Kinerja

Tabel 3.2.3 Realisasi Kinerja dari tahun 2014 s.d 2016

No	Indikator	Satuan	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Target RPJMD	
						2013	2018
1.	Persentase ketersediaan energi dan protein/PPH Ketersediaan	Poin	97,75	97,74	97,26	-	-
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Poin	82,5	79,9	82,6	-	-

Keberhasilan / Kegagalan :

1. Menurunnya produksi pangan dan meningkatnya pertumbuhan penduduk akibat kedatangan perantau dari pulau Jawa dan Sulawesi menyebabkan menurunnya persentase ketersediaan energi dan protein pada tahun 2016;
2. Tahun 2015, skor PPH Konsumsi mengalami penurunan 9% dari realisasi 2014 disebabkan konsumsi dari kelompok pangan padi-padian dan pangan hewani masih rendah. Namun masyarakat Kalimantan Timur sudah mengenal sumber karbohidrat lain untuk menyikapi dampak penurunan produksi padi tahun 2015. Sedangkan di tahun 2016, skor PPH Konsumsi mengalami peningkatan 9% dari tahun 2015 disebabkan konsumsi padi-padian dan pangan hewani sudah stabil, walaupun konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan, sayur dan buah masih rendah.

Alternatif Solusi :

1. Meningkatkan produksi pangan;
2. Meningkatkan sosialisasi keberagaman konsumsi pangan sumber karbohidrat; meningkatkan sosialisasi konsumsi sayur dan buah; meningkatkan sosialisasi dan publikasi menu-menu beragam dan bergizi.

Tabel 3.2.4 Efisiensi Tingkat Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	% Capaian	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi

				Anggaran	
1.	Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan energi dan protein	102	89,40	1,14
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	101	83,19	1,21

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan :

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perebunan)
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
4. Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas
5. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DPA SKPD dan DPPA SKPD Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Tahun 2016, jumlah anggaran yang tersedia adalah Rp. 31.615.639.500,- , yaitu anggaran BKPP sebesar Rp. 21.858.324.600,- dan UPTB Bapeltan sebesar Rp. 9.757.314.900,- dengan realisasi secara keseluruhan mencapai Rp. 28.398.303.910,- (90 %).

Untuk mewujudkan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tersedia anggaran sebesar Rp.21.409.140.000,- dengan dengan realisasi sebesar Rp.18.741.545.481,- (88 %).

Realisasi anggaran per program dan per kegiatan yang digunakan untuk mencapai target kinerja tahun 2016 dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.3.1 Realisasi Anggaran Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan 2016

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			Program Peningkatan Ketahanan Pangan		

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Jumlah ketersediaan kalori	2800	Kkal/kap/hr	1.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	204.645.000	189.902.400
Jumlah					204.645.000	189.902.400
Jumlah ketersediaan protein	75	gram/kap/hr	2.	Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan	142.800.000	81.021.000
			3.	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah	287.700.000	194.392.700
			4.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1.220.800.000	872.165.350
Jumlah					1.651.300.000	1.147.579.050
Jumlah cadangan pangan pemerintah setara beras	175	Ton	5.	Analisis rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	125.450.000	85.176.600
			6.	Pengembangan Cadangan Pangan	1.384.275.000	109.413.400
			7.	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	134.850.000	95.546.100
			8.	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	1.673.710.000	1.023.458.550
Jumlah					3.318.285.000	1.313.594.650
Jumlah konsumsi kalori minimal	1.920	Kkal/kap/hr	9.	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	85.500.000	81.075.400
Jumlah					85.500.000	81.075.400
Jumlah konsumsi protein minimal	54,4	gram/kap/hr	10.	Pemanfaatan Perkarangan untuk Pengembangan Pangan	485.100.000	158.768.200
			11.	Peningkatan Mutu Keamanan Pangan	2.387.925.000	1.111.124.013
Jumlah					2.873.025.000	1.269.892.213
Jumlah konsumsi beras	79,64	kg/kap/thn	12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	180.800.000	153.662.500
			13.	Pengembangan Diversifikasi Tanaman	995.450.000	581.573.200
			14.	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	297.250.000	100.221.000
Jumlah					1.473.500.000	835.456.700
% Stabilitas harga pangan	10	%	15.	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	160.300.000	123.695.648
Jumlah					160.300.000	123.695.648
% Stabilitas pasokan pangan	85	%	16.	Kajian Rantai Pasokan dan Pemasaran Pangan	128.850.000	81.899.955

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			17.	Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat	151.300.000	76.784.550
			18.	Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	83.850.000	0*)
Jumlah					364.000.000	158.684.505
% Ketersediaan informasi harga pangan pokok	85	%	19.	Pengembangan Sistem Informasi Pasar	212.020.000	177.084.400
Jumlah					212.020.000	177.084.400
			Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan			
Jumlah penyuluh pertanian berkualitas	985	Orang	20.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	3.654.638.000	1.491.666.610
			21.	Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	171.500.000	67.186.400
			22.	Pengembangan SDM Penyuluh	495.250.000	228.651.900
			23.	Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan	936.825.000	495.084.100
			24.	Koordinasi Kebijakan Penyuluh	243.375.000	96.322.800
			25.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh	124.000.000	29.344.000
Jumlah					5.625.588.000	2.408.255.810
			Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan Berkualitas			
Jumlah penyuluh perikanan berkualitas	100	Orang	26.	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Kelautan dan Perikanan	353.550.000	187.973.289
Jumlah					353.550.000	187.973.289
			Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluh			
Jumlah BPP	120	Unit	27.	Pengembangan Kelembagaan Penyuluh	948.750.000	496.512.000
Jumlah					948.750.000	496.512.000
			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			
			26.	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	1.698.200.000	637.909.300
			27.	Penyuluhan dan Pendampingan Petani	4.361.000.000	2.811.384.500

Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
			dan Pelaku Agribisnis		
			28. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	376.025.000	267.915.600
			Jumlah	6.435.225.000	3.717.209.400
Jumlah				23.705.688.000	12.106.915.465

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2016 yang disusun dari asumsi atas kondisi perekonomian yang terjadi sampai dengan triwulan I terjadi perubahan dari beberapa indikator ekonomi makro seperti penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan realisasi PDRB dengan migas yang didominasi lifting minyak dan produksi batubara, tingginya tingkat inflasi, berkurangnya nilai ekspor impor daerah, serta naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selain itu, pada tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2015, yang antara lain berasal dari sisa lebih realisasi anggaran dan over target penerimaan daerah.

Atas kondisi tersebut dan sejalan dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016, Pemerintah Daerah menyusun Perubahan RKPD 2016 terlebih dahulu yang selanjutnya menjadi acuan dalam menyusun Perubahan KUA PPAS dan APBD tahun 2016 yang di dalamnya mencakup perubahan besaran asumsi dasar ekonomi makro, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan anggaran.

Oleh sebab itu terjadi dampak yang cukup signifikan pada pencapaian target rencana kinerja tahunan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Timur karena pemangkasan anggaran sebesar rata-rata 37,5% dari DPA Murni SKPD. Yaitu senilai Rp.9.648.885.000,- (38%) dari Rp. 25.375.235.000,- pada program-program strategis dan Rp. 7.549.945.000,- (37%) dari Rp. 20.578.660.000,- pada program-program pendukung. Dimana anggaran semula berjumlah Rp. 45.953.895.000,- menjadi Rp. 28.755.068.000,-

BAB IV
P E N U T U P

Salah satu tugas Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan sebagai salah satu dari 53 SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah memastikan kondisi ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan, konsumsi pangan, aksesibilitas pangan cukup bagi masyarakat Kalimantan Timur dan penanganan penyuluhan yang baik.

Secara umum di dalam pencapaian indikator kinerja telah menunjukkan peningkatan kinerja secara keseluruhan, namun ada beberapa indikator yang harus di dalami lebih lanjut dalam rangka memastikan keberhasilan yang dihasilkan merupakan simultan antara indikator yang satu dengan indikator yang lainnya saling mempengaruhi. Yang belum berhasil, merupakan pelajaran yang berharga dalam rangka menyiapkan program dan kegiatan yang lebih berorientasi hasil ke depan.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memacu pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

